

Pengusaha dan Politik: Studi Motivasi Pengusaha Mengikuti Pemilu Legislatif di Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2019

Dimas Alfarizi Mustiko Aji*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini tujuan peneliti adalah ingin mengetahui motivasi pengusaha, dimana beberapa pengusaha yang telah mapan secara ekonomi mencoba mengikuti pemilihan anggota DPRD di Kab. Bojonegoro, disini peneliti ingin menggali lebih dalam terkait motivasi pengusaha yang mengikuti kontestasi Politik yang dimana dengan faktor ekonomi yang telah mapan sebenarnya apa yang dicari oleh para pengusaha tersebut sehingga mau untuk mengikuti pemilu legislatif dan bagaimana para pengusaha menggunakan kekuasaannya sebagai pengusaha untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam perhelatan pemilu legislatif. Dalam era demokrasi ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa pengusaha diuntungkan dalam kontestasi politik karena dengan biaya demokrasi yang besar jarang dari para masyarakat biasa yang bisa terpilih dalam pemilu yang diselenggarakan. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif, dimana dalam memperoleh data peneliti menggunakan wawancara yang mendalam dengan para responden dengan menyamarkan identitas dari para responden. Peneliti menggunakan teori motivasi dari Mc Clelland dan Kekuasaan Robert Dahl.

Kata kunci : Motivasi, DPRD, Pengusaha, Kekuasaan,

ABSTRACT

In this research, the aim of the researchers was to know the motivation of entrepreneurs, where several well-established entrepreneurs economically tried to participate in the election of DPRD members in Kab. Bojonegoro, here researchers want to dig deeper about the motivation of entrepreneurs who take part in Political contestations where the established economic factors are actually what the entrepreneurs are looking for so they want to take part in legislative elections and how entrepreneurs use their power as entrepreneurs to gain as many votes as the number of legislative elections. In this democratic era, it is undeniable that entrepreneurs benefit from political contestation because of the large costs of democracy, rarely from ordinary people who can be elected in the elections held. In this study the method used is descriptive qualitative method, where in obtaining research data using in-depth interviews with respondents by disguising the identity of the respondents. The researcher used motivational theory from Mc Clelland and Robert Dahl's Power

Keywords : Motivation, DPRD, Entrepreneurs, Power,

* Penulis adalah mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. dimasalfarizid@gmail.com

Pendahuluan

Keterkaitan antara pengusaha dengan dunia politik sudah lama ada di Indonesia. Konteks sejarah menunjukkan bahwa relasi antara pengusaha dan politisi di Indonesia telah terjalin sejak lama. Pada masa orde baru, para pengusaha memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah khususnya dengan presiden. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa pada masa itu Soeharto telah berhasil membangun kerajaan politik sekaligus kerajaan bisnisnya. Beberapa analis politik menyebut Soeharto membentuk sebuah oligarki politik, yaitu politik mempertahankan kekayaan atau kesejahteraan.

Hasil studi Vedi Hadiz (2015) menunjukkan bahwa Soeharto telah membentuk oligarki politik yang terdiri dari anggota militer, pengusaha cina, beberapa pengusaha pribumi, sekaligus kerajaan bisnis yang dibangun oleh anak-anaknya. Diantarnya adalah Bob Hasan (pengusaha kayu lapis), Liem Sioe Liong (pemilik Salim Group), keluarga Ryadi (pemilik Lippo Grup), Siti Hardianti Rukmana (anak Soeharto, pemilik Citra Lamtoro Gung) Bambang Tri Hatmojo (anak Soeharto pemilik perusahaan Bimantara), Tomy Soeharto (pemilik Humpuss) . Pada orde baru peran pengusaha hanya menjadi supporting system dengan anggpan para pengusaha tersebut memiliki relasi ekonomi dan politik yang lebih luas.

Pasca Orde Baru, sistem politik Indonesia mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Indonesia memulai babak baru dengan menerapkan sistem multi partai. Sistem ini telah melahirkan partai-partai baru. Bila selama orde baru peserta pemilu hanya dua Partai dan satu golongan, yaitu partai hanya ada tiga, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terdapat 48 partai yang bersaing dalam perebutan kekuasaan pada pemilu 1999. Sistem multi partai ini juga mengharuskan setiap partai untuk menghidupi diri sendiri. Kekuatan finansial partai menjadi salah satu penentu kekuatan partai bersaing memperebutkan kekuasaan di parlemen yang selanjutnya berdampak pada 'bargaining' bagi penempatan orang-orang partai di legislatif. Salah satu akses bagi kekuatan finansial itu didapatkan dari para pengusaha Aris Kelana & Rohmat Haryadi (2002).

Sistim multi partai memberi kesempatan sangat luas bagi para pengusaha untuk terlibat langsung dalam politik praktis. Pengusaha memiliki kebebasan untuk bergabung dengan 48 partai politik yang ada di Indonesia, sehingga mereka tidak terkonsentrasi pada Golkar seperti pada masa orde baru. Gerbang demokrasi telah terbuka lebar bagi siapapun

untuk mengikuti kontestasi politik yang diselenggarakan oleh negara, termasuk pengusaha. Para pengusaha seakan berlomba memasuki dunia politik. Apabila sebelumnya para pengusaha lebih banyak memilih berada di balik layar, tetapi pasca orde baru para pengusaha berpikir lebih untuk mendapat kekuasaan. Kalau dulu pengusaha hanya supporting tim, berada di balik layar, sekarang jadi aktor utama. Sejumlah pengusaha papan atas bergabung ke partai politik, seperti; Jusuf Kalla (Pemilik Kalla Group, politisi Partai Golkar), Aburizal Bakrie (politisi Partai Golkar, pemilik Bakrie Group), Surya Paloh (politisi Partai Nasdem, Pemilik Media Group), Hari Tanoe Sudibyo (politisi Partai Perindo, Pemilik MNC Group), Rusdi Kirana (politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Pemilik Lion Air), M Nazaruddin (politisi Partai Demokrat, pemilik Permai Group), Zulkifli Hasan (politisi Partai Amanat Nasional, pengusaha asal Lampung,), Pramono Anung (politisi PDI Perjuangan, pengusaha pertambangan), dan masih banyak lagi.

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda pasca jatuhnya rezim orde baru dan masuknya era reformasi. Oligarki tetap bertengger dalam perpolitikan Indonesia. Reformasi tidak mampu mengubah tatanan politik oligarki meski rezim telah terganti. Panggung politik Indonesia masih dihiasi oleh waja-wajah pengusaha. Meskipun sebagian dari mereka memiliki latar belakang politik yang kuat, namun mereka juga memiliki jaringan usaha yang sangat besar. Fakta ini semakin menguatkan argumen bahwa dunia politik di Indonesia sangat erat dengan pengusaha. Mayoritas yang menduduki parlemen dan pemerintahan diisi oleh kalangan pengusaha, hal itu menegaskan bahwa pengusaha memiliki kesempatan besar terpilih dan duduk di kursi pemerintahan. Gerbang demokrasi yang dibuka pada era reformasi malah membuat ketimpangan baru antara para pengusaha dan masyarakat biasa dalam konteks kontestasi politik.

Penelitian yang membahas mengenai motivasi pengusaha dalam kontestasi politik juga sudah banyak dilakukan oleh beberapa orang, salah satunya adalah penelitian dari Nur Satya (2013). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seorang kandidat memiliki dua kriteria ketika mengikuti kontestasi politik, yang pertama adalah. Motivasi ekonomi menjadi salah satu factor untuk dijadikan pertimbangan ketika membuat kebijakan harus melihat untung dan ruginya. Motivasi politik lebih cenderung untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang dibuat. Selain itu penelitian dari Izzatun Nikmah (2016). Hasil dari penelitian tersebut Partai PDIP memberikan rekomendasi kepada para pengusaha yang memiliki peluang lebih besar dari pada yang bukan pengusaha, motivasi caleg yaitu meliputi dorongan dari partai, motivasi personal, dorongan masyarakat serta orang-orang terdekat. Contoh lain adalah seperti penelitian dari M. Ali Azhar (2012). Hasil dari

penelitian tersebut adalah bahwa perpindahan para pengusaha menjadi seorang penguasa adalah sebuah pilihan yang rasional karena dianggap dengan modal ekonomi yang telah cukup mereka, tidak akan mencari untung dari kekuasaan yang dimiliki, tetapi dari sudut pandang negative dengan gelontoran uang ketika proses pemilihan ditakutkan bahwa pengusaha tersebut akan mencoba mencari keuntungan dari kekuasaan yang dimiliki. Contoh berikutnya adalah hasil penelitian dari Dodi Suprihanto (2011) yang dimana ditemukan bahwa dengan adanya hubungan antara pengusaha dan penguasa malah menjadikan praktek KKN menjamur dan merambah dari pusat hingga kedaerah. Dengan biaya yang dikeluarkan ketika proses kontestasi maka rasionalnya para pengusaha tersebut ingin mengembalikan modal awal ketika mereka terpilih menggunakan praktek-praktek yang melanggar hukum. Yang terakhir adalah contoh penelitian dari JR. Situmorang (2016), yang dimana bagi para pengusaha stabilitas politik itu penting dikarenakan stabilitas politik berperan besar terhadap keamanan usaha dari para pengusaha agar masyarakat yang makmur tidak berbuat anarkis.

Bojonegoro menjadi salah satu kabupaten yang dimana banyak dari para anggota DPRD yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha, dimana dengan asumsi bahwa dengan banyaknya sumberdaya yang dimiliki maka para pengusaha yang terjun dalam kontestasi politik, lebih memiliki peluang untuk terpilih, hal tersebut juga di yakini oleh beberapa pengusaha dari beberapa daerah, salah satunya dari Bojonegoro. Disini peneliti ingin mengetahui apa sebenarnya motivasi dari para pengusaha ketika mengikuti pemilihan sebagai anggota DPRD. Karena dengan kekuatan ekonomi yang sudah stabil, sebenarnya apa yang memotivasi pengusaha untuk terjun ke dalam dunia politik khususnya di DPRD kabupaten Bojonegoro.

Motivasi Politik Para Pengusaha

Motivasi merupakan energi yang tersedia yang akan dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan/dorongan dari kebutuhan individu dan situasi serta peluang yang tersedia. Selain itu motivasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku dalam melakukan sesuatu, sehingga mencapai hasil dan tujuan Mc. Clelland (1961). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu usaha yang bersumber pada energi yang ada di dalam diri manusia yang akan dilepaskan dan dikembangkan secara sadar untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku individu untuk melakukan sesuatu.

Para pengusaha yang terjun ke dunia politik bukan semata-mata hanya ingin mensejahterakan rakyat seperti yang dikatakan ketika berlangsungnya kampanyenya banyak faktor yang mempengaruhi para pengusaha untuk terjun langsung ke dunia politik, yang pertama adalah faktor kekuasaan, dimana mereka dapat memiliki kekuasaan. Kekuasaan menurut Ramlan Surbakti (2010) merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk berfikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kekuasaan dilihat sebagai interaksi antara yang mempengaruhi dan dipengaruhi atau yang satu mempengaruhi dan yang lainnya mematuhi. Dengan memiliki kekuasaan dan dapat mempengaruhi kebijakan para anggota DPRD yang berlatar belakang pengusaha tersebut mencoba untuk dapat mengembangkan dan mengamankan usaha yang telah mereka geluti sebelum menjabat sebagai anggota DPRD.

Kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan Robert Dahl (1978), dengan memiliki kekuasaan atau pengaruh terhadap orang lain maka dengan mudah para pengusaha ini mendapatkan apa yang diinginkan, dalam konteks anggota DPRD yang memiliki background sebagai pengusaha mereka memiliki fungsi yang dapat digunakan untuk menekan instansi tertentu fungsi pengawasan yang biasanya digunakan oleh anggota DPRD untuk menekan dan mencari keuntungan.

Kebanyakan pengusaha yang menjadi anggota DPRD adalah seorang pengusaha yang bergelut di bidang jasa konstruksi, dengan kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki para pengusaha tersebut dapat mendapatkan proyek dari pemerintah yang dimana memang pada kurun waktu 2009-2018 kabupaten Bojonegoro lagi giat-giatnya membangun infrastruktur seperti ada program pavingisasi yang dicanangkan Bupati pada waktu itu Suyoto. Dengan adanya peluang seperti itu para pengusaha mencoba menekan dan menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk mendapatkan proyek yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Para pengusaha ini juga memaksimalkan kekuasaannya untuk membangun sebuah kekuatan dan suara ketika mereka mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, yang dimana dengan kekuasaan terhadap begitu banyak pegawai yang kerja dengan mereka maka dengan gampang untuk mendulang suara melalui relasi dari para pekerja, bukan hanya itu dengan usaha dan banyak fasilitas yang dimiliki para pengusaha mereka dengan mudah

mendapatkan suara dengan cara membiarkan konstituentnya menggunakan fasilitas yang ada, dengan begitu para pengusaha mendapatkan simpati dari para masyarakat.

Seperti yang dilakukan oleh AH dan SP yang merupakan pengusaha dan terpilih menjadi anggota DPRD mereka sering menggunakan sumberdaya dan kekeayaannya untuk memberikan hiburan untuk para konstituennya, sering sekali AH dan SP membuat semacam hiburan bagi masyarakat seperti membuat konser dangdut, kompetisi sepakbola, volley dan bisanya mereka secara langsung menemui para masyarakat untuk dapat membangun relasi secara emosional, mereka biasanya membuat semacam acara pengajian untuk dapat merekatkan hubungan mereka dengan para masyarakat. Bukan hanya AH dan SP, hal serupa juga dilakukan oleh beberapa pengusaha yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD yang dimana juga memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat mendulang suara sebanyak-banyaknya, hal tersebut juga di-iyakan oleh para tetangga dekat mereka dan menganggap bahwa bentuk atau cara yang dilakukan oleh para pengusaha adalah sesuatu yang wajar dan sudah seharusnya dilakukan karena para pengusaha tersebut juga membutuhkan suara-suara dari masyarakat ketika diadakannya pemilu.

Diantara banyak bentuk kekuasaan, kekuasaan politik adalah salah satu bentuk yang harus dipertahankan, karena dengan kekuasaan politik penguasa dapat mempengaruhi kebijakan umum baik dalam proses pembuatan kebijakan atau saat implementasinya tentu hal tersebut untuk kepentingan pemilik kekuasaan, dalam konteks ini adalah pengusaha. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk mendapat ketaatan warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk memengaruhi tindakan dan aktivitas penguasa di bidang administratif, legislatif dan yudikatif (Miriam Budiardjo, 1982 : 27).

Selain beberapa kegiatan yang dibuat oleh para pengusaha yang terpilih menjadi anggota DPRD tersebut, mereka menggunakan Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) sebagai alat untuk merawat para konstituen, pemberian jasmas sendiri biasanya tidak dapat mencakup kebutuhan banyak orang, Jasmas diberikan hanya kepada pendukung dari para pengusaha yang telah terpilih menjadi anggota DPRD tersebut. Selain pemberian Jasmas para pengusaha tersebut juga memberikan lapangan pekerjaan, dengan usaha yang semakin berkembang tentu saja dibutuhkan tenaga kerja yang semakin banyak, hal tersebut dimanfaatkan untuk merawat para pendukung dengan memberikan lapangan pekerjaan.

Yang memotivasi seseorang demi mendapatkas sebuah power dimana mereka dapat mengatur dan menjadi pengaruh bagi orang lain dijelaskan oleh Mc. Clelland (1987) dalam tiga teori kebutuhan, dan yang menjelaskan perihal motivasi tersebut yaitu need of power yang artinya adalah seseorang mempunyai dorongan dari dalam tubuhnya untuk mendapatkan pengaruh, kontok dan kuasa terhadap orang lain. Dalam konteks motivasi pengusaha mengikuti kontestasi politik need for power milik Mc. Clelland sangat relevan karena memang dalam realitasnya para pengusah yang terjun ke dunia politik memiliki keinginan untuk dapat memiliki pengaruh dan memiliki kuasa terhadap orang lain maupun institusi pemerintah.

Para pengusaha memilik dorongan dari dalam tubuh mereka untuk dapat memiliki pengaruh agar dapat memajukan dan mengembangkan usaha yang telah mereka jalani banyak juga pengusaha yang telah menjabat sebagai anggota DPRD memiliki usaha baru dan meninggalkan usaha yang telah digeluti sejak awal, karena mereka beranggapan bahwa usaha baru mereka lebih memiliki prospek jangka panjang dan dengan pengaruh yang dimiliki para anggota DPRD untuk dapat mengembangkan usaha dengan cepat. Maka dengan alasan seperti banyak dari para pengusaha yang secara langsung terjun ke panggung politik praktis. Banyak juga dari mereka yang terpilih lebih dari dua periode.

Motivasi Ekonomi Para Pengusaha

Selain memiliki motivasi politik disini para pengusaha juga memiliki motivasi ekonomi sebagai pendorong mereka untuk mengikuti kontestasi politik. Pengusaha dari level pusat hingga daerah terjun secara langsung kedalam panggung politik dikarenakan memang sejak dibukanya gerbang demokrasi para pengusaha memiliki peluang untuk terjun ke dunia politik. Jiwa sebagai seorang pengusaha yang ada didalam diri mereka maka dengan mudah mereka memanfaatkan kekuasaanya sebagai anggota DPRD untuk memperbesar relasi dan kepentingan untuk mengamankan usaha mereka. Dengan tingginya biaya demokrasi maka ada sebuah keinginan dari para pengusaha untuk mengembalikan modal pada saat proses pemilihan berlangsung.

Pendapatan pengusaha sebelum menjabat sebagai seorang anggota DPRD jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketika menjadi DPRD dengan adanya uang gaji perbulan ditambah dengan adanya kemungkinan berkembangnya sebuah usaha maka dengan mudah membuat banyak dari pengusaha yang tertarik terjun ke panggung politik secara langsung. Pada masa kampanye para pengusaha ini tidak tanggung-tanggung dalam menggelontorkan

uang mereka demi mendapatkan hati dan suara dari para pemilih, dengan menyewa beberapa media lokal seperti Radar Bojonegoro, Bass Fm dll para pengusaha tersebut dengan mudah dikenal oleh para pemilih. Dengan terjadinya hal tersebut maka dengan mudah para pengusaha dapat terpilih menjadi anggota DPRD.

Dari semua responden yang telah saya teliti 90% mereka masuk kedalam dua kriteria yang dijelaskan oleh Mc. Cleland yaitu need for power dan hanya 10% yang cenderung ke need for achivement, dari analisa saya 90% pengusaha yang terjun ke panggung politik khususnya dalam pemilihan legislative di Kabupaten Bojonegoro memiliki keinginan untuk memiliki kekuatan untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan yang ada sehingga para pengusaha tersebut dapat mencari keuntungan dari setiap kebijakan yang ada. Dengan memiliki Fungsi pengawasan mereka menjadikan fungsi tersebut untuk menekan beberapa dinas terkait untuk memberikan proyek kepada para anggota DPRD.

Kedekatan dengan beberapa dinas terkait juga memiliki dampak terhadap usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh para anggota DPRD yang memiliki background sebagai pengusaha, beberapa Anggota DPRD yang memiliki CV tidak malu-malu untuk meminta proyek kepada dinas terkait, dengan mudahnya akses dan kedekatan dengan dinas-dinas, usaha-usaha tersebut berkembang dengan pesat. Ada sebuah praktek nepotisme antara anggota DPRD dengan orang dari beberapa dinas, dengan adanya praktek tersebut maka keduabelah pihak akan sama-sama mendapatkan untung dari proyek yang sedang dijalankan. Kebanyak proyek yang sedang dijalankan terkait pembangunan infrastruktur karena memang ada program pavingisasi dari pemerintah kabupaten.

Selain memanfaatkan kedekatan dengan para dinas untuk mendapatkan beberapa proyek, anggota DPRD juga memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah untuk dapat membuat izin usaha-usaha baru yang sedang akan dikerjakan, banyak dari para pengusaha yang membuat usaha-usaha baru pasca terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Dengan kedekatan dengan pemerintah izin usaha dengan mudah didapatkan sehingga para pengusaha yang telah mapan dari usaha lama mereka akan mendapatkan tambahan pendapatan dari usaha baru mereka. Dengan usaha yang harus memiliki izin khusus dan hal tersebut dapat dengan mudah didapatkan oleh para anggota DPRD maka secara otomatis mereka diuntungkan karena semakin sulit izin didapatkan semakin kecil persaingan bisnis yang terjadi.

Dengan APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) untuk pembangunan lebih dari satu setengan triliun rupiah, memang sangat wajar apabila banyak pengusaha yang merambah ke bidang jasa konstruksi, karena memang sangat menjanjikan. Dan lebih dari tiga dari sepuluh responden yang saya wawancarai menambah usaha mereka ke bidang jasa konstruksi, peluang-peluang untuk merambah usaha kebidang jasa konstruksi dan pendapatan yang bertambah berkali-kali lipat tersebut membuat semua responden yang saya wawancarai mengikuti kontestasi politik lebih dari satu kali dan hampir semua terpilih dalam setiap pemilihan legislative yang diselenggarakan.

Tidak semua merambah ke bidang jasa konstruksi ada yang memang dari awal menggeluti sebuah usaha dan focus terhadap usaha tersebut, seperti yang saya temukan dilapangan ada seorang pengusaha yang sebelum terpilih menjadi anggota DPRD memiliki usaha berupa perusahaan kayu yang dimana beliau mengolah bahan kayu jati gelondongan menjadi peralatan mable dan bangunan, tetapi pasca terpilih menjadi anggota DPRD pengusaha tersebut focus dan mengembangkan usaha lamanya. Dengan kedekatan dengan perhutani dia memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan kebutuhan kayu jati yang akan dia olah. Dengan begitu perusahaan kayu yang sudah dijalani sebelum menjabat sebagai anggota DPRD berkembang dengan pesat setelah duduk di kursi parlemen.

Selain itu ada beberapa pengusaha yang memang tidak mendirikan perusahaan besar ketika menjabat sebagai anggota DPRD beberapa dari pengusaha tersebut hanya menggunakan kekuasaanya ketika ada beberapa proyek yang sifatnya sementara, seperti seseorang yang telah menjabat sebagai anggota DPRD yang terpilih dalam tiga periode berturut-turut dia memilih untuk tidak merambah ke bidang usaha konstruksi, tetapi memilih untuk menyuplai kendaraan ke Exxon Mobile yaitu perusahaan minyak dari Amerika Serikat. Tanpa adanya relasi dan kedekatan dengan pemerintah maka akan sangat sulit untuk mendapatkan peluang usaha seperti itu. Dari situ terlihat bahwa anggota DPRD memiliki power yang besar untuk dapat mengembangkan usaha ataupun menambah usaha.

Dari beberapa contoh yang telah dikemukakan diatas terbukti bahwa motivasi yang mendorong pengusaha untuk terjun ke panggung politik praktis adalah motivasi ekonomi yang didasari oleh keinginan dari para pengusaha untuk mengembangkan usaha dan menambah usaha baru, dengan kekuasaan yang dimiliki para pengusaha dengan sangat mudah melakukan hal tersebut, maka tidak heran apabila ada beberapa pengusaha yang terpilih beberapa kali menjadi anggota DPRD, dan tidak heran juga banyak pengusaha yang

rela mengeluarkan dana besar saat proses kampanye, karena dengan adanya peluang yang besar untuk mengembangkan usaha mereka hal tersebut sangat relevan untuk dilakukan.

dengan memiliki kebesaran nama seorang anggota DPRD tentu sangat mudah untuk membuat sebuah relasi bisnis dengan para investor yang ada di Kabupaten Bojonegoro, menjadi seorang anggota DPRD menurut beberapa pengusaha memang memiliki nilai lebih dibandingkan hanya menjadi seorang pengusaha, maka dari itu banyak pengusaha yang mulai terjun ke dunia politik dan mengikuti kontestasi politik. Untuk dapat menambah relasi bisnis dan mengamankan usaha-usaha mereka, sehingga sebuah kekuatan ekonomi dan social akan terbentuk untuk bisa dijadikan modal dalam pemilihan legislative pada periode mendatang.

Para pengusaha tidak menyangkal bahwa motivasi ekonomi yang membuat mereka serius terjun ke dunia politik praktis, karena dengan asumsi kemudahan akses dan informasi ketika menjabat sebagai anggota DPRD dana besar yang dikeluarkan saat kampanye akan terlunasi saat mereka menjabat sebagai anggota DPRD.

Kesimpulan

Peran pengusaha dalam dunia politik memang sudah terjadi sejak era Orde Baru yang dimana ada perbedaan peran dari para pengusaha ketika era orde baru dengan era pasca reformasi, pada era orde baru para pengusaha hanya menjadi supporting system bagi para politisi, dengan anggapan bahwa ketika para pengusaha memiliki kedekatan dengan para politisi usaha-usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan aman dan lancar, maka sebab itulah para pengusaha menjadi supporting system untuk para politisi. Berbeda dengan peran pengusaha pasca reformasi, dengan dibukanya gerbang demokrasi setiap orang memiliki hak untuk mengikuti kontestasi politik yang diselenggarakan oleh negara, dan sejak saat itulah banyak pengusaha yang terjun langsung ke politik praktis bukan lagi menjadi supporting system seperti pada era Orde Baru.

Kekuasaan yang dimiliki ketika menjabat sebagai anggota DPRD adalah salah satu faktor yang menjadi motivasi pengusaha untuk terjun ke panggung politik, karena dengan memiliki kekuasaan di dalam tubuh pemerintahan mereka dapat mempengaruhi beberapa pihak demi keuntungan usahanya, maka banyak dari pada pengusaha yang terjun dan mengikuti kontestasi politik secara serius, dikarenakan besarnya peluang untuk dapat mengembangkan usaha-usaha mereka. Karena menurut Mc. Clelland para pengusaha

tersebut masuk dalam kriteria *need for power* dimana mereka menginginkan pengaruh dan control terhadap siapapun yang ada disekelilingnya.

Untuk dapat menjadi anggota DPRD para pengusaha tersebut menyuruh para pekerjanya untuk membantu mencari suara untuk memenangkan pengusaha tersebut, karena pengusaha tersebut memiliki kendali terhadap para pekerjanya, sehingga para pekerja yang disuruh untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya tidak dapat menolak karena ada sebuah relasi antara bos dan pegawai. Maka peluang bagi para pengusaha untuk terpilih menjadi anggota DPRD sangat besar karena mereka memiliki modal ekonomi yang melimpah dan modal social yang besar juga.

Daftar Pustaka

- Azhar, Ali. 2012. *Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha jadi Penguasa*. Bali. Universitas Udayana. Jurnal
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dahl, Robert. 1977. *Modern Polictical Analysis*. New Delhi: Pretience-Hall of India Private Ltd
- Hadiz, Vedi. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3S
- Kelana Aries dan Haryadi, Rohmat. *Yang Makmur Di Pentas Politik* (diunduh dari (www.gatra.com), tanggal 28 Februari)
- Mclelland, David. 1961. *Human Motivaation Theory*. Diakses dari <https://managementmania.com/>
- Nikmah, Izzatun. 2017 *Pengusaha Dalam Pemilu Legislatif 2014 Studi Tentang: Kandidasi Para Pengusaha di PDIP Kota Surabaya*. Surabaya. Universitas Airlangga. Skripsi.
- Satya, Nur. 2013. *Motivasi Dan Strategi Kandidat Dalam Pilkades (Studi Deskriptif Kemenangan Wasidi dalam PILKADES 2012 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*. Surabaya. Universitas Airlangga. Skripsi.

- Situmorang, Jr. 2016. *Beberapa Keterkaitan Antara Politik dan Bisnis*. Bandung. Universitas Katolik Parahayangan.
- JurnalSuprihanto, Dodi. 2011. *Pengusaha dan Politik: Keterlibatan Pengusaha Dalam Dunia Politik Di Sumatera Barat 1999 – 2009*. Padang. Universitas Andalas. Skripsi.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia